

Pemerintahan kolonial belgia membedakan suku yang ada berdasarkan bentuk fisik. Suku Tutsi memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, dan menyerupai bentuk tubuh orang kulit putih, sedangkan suku Hutu memiliki badan rata-rata, seperti orang Afrika kebanyakan. Hal ini menyebabkan suku Tutsi menjadi suku yang memiliki kasta lebih tinggi. Dan kebanyakan kelompok elit yang berada di dalam kerajaan Ruanda-Burundi pun berasal dari suku Tutsi. Sehingga yang duduk di dalam pemerintahan Rwanda semasa kolonisasi Belgia adalah suku Tutsi, sedangkan suku Hutu menjadi kasta rendah dan hanya menjadi rakyat biasa.

Kemudian suku Hutu lebih banyak ditempatkan sebagai budak dalam mengelola tanah pertanian dan perkebunan di pemerintahan kolonial Belgia tersebut. Ketika permintaan kemerdekaan dimulai, maka di bentuklah sebuah partai politik oleh kalangan elit yang duduk dalam pemerintahan, yaitu *Union Nationale Rwandaise* (UNAR). Seakan tidak mau kalah dalam pergerakan politik maka terjadilah pergerakan emansipasi Hutu yang di mulai pada tahun 1957, dimana Gregoire Kayibanda, yang menulis 'Hutu Manifesto', mendirikan Partai pergerakan emansipasi Hutu (PARMEHUTU). Pada tahun 1960, pemerintah kolonial Belgia mengadakan pemilihan umum yang demokrasi di kerajaan Rwanda, dimana wakil-wakil Hutu terpilih untuk duduk didalam pemerintahan kolonial Belgia, karena pemilihnya bermayoritas suku Hutu. Hal ini menimbulkan perubahan struktur kekuatan yang ada di kerajaan Ruanda-Urundi.

Karena terjadinya perpindahan kekuasaan di dalam pemerintahan kolonial Belgia tersebut, suku Tutsi mencoba untuk mempertahankan kekuasaan dengan

antara suku Hutu dan suku Tutsi. Pertikaian yang terus terjadi menyebabkan tidak berjalannya pemerintahan kolonial Belgia. Dan juga menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak, sehingga masyarakat banyak yang mengungsi keluar dari kerajaan Rwanda.

Akhirnya pada tahun itu juga Ruanda-Urundi dipisah menjadi Rwanda dan Burundi. Pada tanggal 1 Juli 1962, Rwanda dinyatakan merdeka dan menjadi Negara republik dengan partai PARMEHUTU sebagai partai mayoritas. Lalu di pilihnya Gregoire Kayibanda, sebagai presiden pertama Rwanda (1962-1973).²

Pada tahun 1965, PARMEHUTU sebagai partai yang mayoritas dalam pemerintahan, mulai mengemukakan ideology rasisme. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari partai lain ataupun suku lain sehingga sering terjadinya perang saudara di negara tersebut. Pada tahun 1973, Kudeta yang dilakukan Mayor Jendral. Juvenal Habyarimana membuatnya terpilih sebagai presiden kedua Rwanda. Pergantian kepemimpinan ini tidak merubah situasi tentang perbedaan etnisitas yang ada di Rwanda. Perang antar suku pun tetap sering terjadi. Pada tahun 1975, Presiden Juvenal membentuk MRND (Movement Revolutionnaire Nationale pour le Developpement), sebuah partai tunggal yang berkuasa di konstitusi dan ini menguatkan posisinya dalam pemerintahan yang dia pegang saat itu, dan menon-aktifkan partai politik lainnya, sehingga membuat dia menjadi calon tunggal untuk pemilihan umum yang mendatang.

Perang antar suku yang terjadi di Rwanda telah menyebabkan banyaknya jatuhnya korban dan ini membuat banyak masyarakat Rwanda yang mengungsi keluar dari negaranya. Kurangnya kesempatan yang diberikan untuk perubahan politik, maka di bentuklah *Rwandese Alliance for National Unity* (RANU) pada tahun 1979 oleh beberapa masyarakat Rwanda, yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat Rwanda supaya dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Dan pada tahun 1987, RANU kemudian berubah menjadi *Rwandese Patriotic Front* (RPF).³

Pada tahun 1990-an Habyarimana mulai merintis suatu pemerintahan yang demokratis dengan multi partai, dimana melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu, Tutsi dan Twa di dalam pemerintahannya. Kebijakan akan multi partai ini, membuat politik di Rwanda bergejolak, dengan munculnya partai-partai politik yang lain, seperti Democratic Republican Movement (MDR), Social Democratic Party (PSD), Liberal Party (LP), Democratic Christian Party (PDC), Coalition for the Defence of the Republic (CDR). Kemudian Habyarimana mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi, pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.. perubahan yang terjadi dalam pemerintahan ini belum memuaskan RPF, karena masih kuatnya pengaruh militer di dalam pemerintahan. Sehingga RPF pun mulai melakukan serangan ke Rwanda dan mengakibatkan terjadinya pertempuran antara RPF dengan tentara Rwanda.

Untuk dapat menyelesaikan konflik ini PBB mengadakan perjanjian Damai Ashura untuk menyelesaikan konflik antar suku yang bertikai pada tahun 1993. Perjanjian Damai Ashura ini terdiri dari lima pilar yaitu: ⁴

- a. Penegakan Peraturan Hukum.
- b. Pembagian Kekuasaan.
- c. Pemandahan dan pemulangan pengungsi yang terlantar
- d. Penggabungan angkatan bersenjata dan,
- e. Dan ketentuan lainnya.

Kekhawatiran sekaligus kekecewaan berlebihan terhadap perjanjian damai Ashura, dimana kekuasaan dari para elite Hutu yang telah ada akan terbagi sehingga mereka tidak lagi memiliki kekuasaan penuh. Dan juga tentang penggabungan angkatan bersenjata, yang mana suku Hutu merupakan mayoritas dalam bidang ini tidak mau berbagi tempat dengan suku Tutsi. Ketidakpuasan ini akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. Habyarimana akhirnya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentangannya, yang merupakan kelompok ekstrimis Hutu, ketika presiden berada di dalam pesawat yang hendak kembali ke Rwanda.

Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana langsung mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini menjadi puncak dari perselisihan yang telah lama terjadi antara dua suku tersebut dan memicu timbulnya pembantaian etnis (*genocide*) besar-besaran di Rwanda. Tanpa

menunggu hitungan hari apalagi minggu, hanya dalam hitungan jam setelah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade.

Pasukan khusus Garda Presiden bekerjasama dengan kelompok militan Rwanda, *Interahamwe* dan *Impuzamugambi*. Dimulai dari ibu kota Rwanda, kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung perjanjian damai Arusha tanpa mempedulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi perjanjian damai Arusha. Sebagian besar korban diletakkan begitu saja dan tidak dimakamkan secara layak. Paling umum saat itu hanyalah ditimbun dengan tanah sekedarnya. Pegunungan Gisozi disinyalir menjadi tempat pemakaman massal. Ditempat ini diperkirakan terdapat 250.000 jasad warga tak berdosa.⁵

Dalam seratus hari pembantaian berbagai kalangan mencatat tidak kurang dari 800.000 jiwa atau paling banyak sekitar satu juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian. Kemudian peristiwa pembantaian ini diakhiri dengan perpindahan kekuasaan ke tangan partai oposisi, yaitu Front Patriotik Rwanda (RPF) pada 4 Juli 1994, yang dipimpin oleh Paul Kagame.

Setelah kemenangannya, RPF segera membentuk pemerintahan koalisi, yang di sebut, *The Broad Based Government of National Unity*, yang dasar fundamentalnya adalah kombinasi dari konstitusi, perjanjian damai Arusha, dan kerjasama partai-partai politik yang ada di Rwanda. Pemerintahan koalisi ini

⁵ <http://www.kompas.com> diakses pada 10 September 2008

berhasil dalam membangun kembali Rwanda setelah kerusuhan terjadi. Dimana sistem hukum ditegakkan kembali, Konstitusi yang ada berdasarkan dari rakyat, serta yang terpenting adalah keberhasilan dalam memperbaiki kondisi perekonomian. Pemilu untuk presiden dan legislatif yang pertama setelah ketegangan antar etnis terjadi, dilakukan pada Agustus dan September tahun 2003.

B. Pokok Permasalahan

Apakah faktor yang mendukung proses transisi demokrasi di Rwanda pasca ketegangan etnis 1994?

C. Kerangka Pemikiran / Teori yang digunakan :

Untuk menggambarkan fenomena demokrasi di Rwanda maka penulis menggunakan beberapa kerangka dasar pemikiran

Teori Transisi Demokrasi

Di dalam teori transisi, Huntington⁶ menyebutkan bahwa terjadinya demokrasi dari rezim non demokratis dapat melalui 4 proses “

- a. Transformasi atau reforma, dimana elit penguasa mengambil upaya memimpin demokrasi
- b. Replacement atau Ruptura, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi
- c. Transplacement atau Ruptforma, dimana demokrasi terjadi akibat negosiasi antara pemerintah dengan kelompok posisi

- d. Intervensi, lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan berupaya untuk mempengaruhi demokrasi suatu negara dari luar.

Dari empat proses tersebut diatas, transisi demokrasi di Rwanda dapat di kategorikan kepada mode Replacement, karena adanya Kelompok oposisi yang memimpin dalam perjuangan menuju demokrasi. Dalam hal ini dapat di lihat bahwa, RPF yang merupakan kelompok oposisi yang menentang pemerintahan otoriter dan kuatnya pengaruh pihak militer, meminta pemerintahan satu partai yang berlaku di Rwanda untuk dihapuskan dan di bentuknya pemerintahan demokratis multi partai yang melibatkan seluruh rakyat Rwanda.

Menurut Gulermo O. Donnel, sebuah proses transisi menuju demokrasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu⁷ :

1. Keberhasilan *recovery economy*
2. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang baru.
3. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan dari kelas menengah dan masyarakat sipil
4. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan

Di tinjau dari factor yang disebutkan oleh O'donnel di atas, dapat di lihat bahwa transisi yang terjadi di Rwanda dapat berjalan di karenakan telah terpenuhinya beberapa factor utama. Antara lain, keberhasilan kelompok

terlihat dari kemampuan RPF, yang merupakan kelompok oposisi, melakukan koalisi dengan partai politik yang ada di Rwanda dalam membentuk suatu pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan koalisi yang terbentuk setelah ketegangan antar etnis terjadi, berhasil dalam mendapatkan dukungan dari kelas menengah dan masyarakat sipil, dimana pemerintahan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakatnya dan berjanji untuk mencegah tidak terjadinya ketegangan antar etnis lagi. Serta kemampuan pemerintahan tersebut dalam *recovery* perekonomian yang anjlok setelah ketegangan terjadi. Pemerintahan koalisi Rwanda ini juga berhasil mendapatkan bantuan dari pihak luar, antara lain kerjasama dengan Negara lain dalam melakukan perbaikan infrastruktur di Rwanda, serta mendapatkan bantuan dana untuk perbaikan ekonomi.

D. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan teori yang telah dijelaskan, maka didapat bahwa faktor yang mendukung proses transisi demokrasi di Rwanda pasca ketegangan antar etnis 1994, antara lain :

1. Keberhasilan kelompok oposisi dalam melakukan perubahan dalam pemerintahan.
2. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan kelas menengah dan masyarakat sipil.
3. Keberhasilan dalam *recovery economy*.

E. Metodologi penulisan dan pengumpulan data

Dalam Ilmu Hubungan Internasional seringkali ditemukan kesulitan dalam teknik meneliti permasalahan internasional yang dikarenakan adanya jarak, kompleksitas masalah, dan lain-lain. Sehingga penulisan ini bersifat anobservasi research dan bersifat deskriptif.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, jurnal di internet dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan proses transisi demokrasi di Rwanda paska Genocide 1994, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai pada saat terjadinya ketegangan antar etnis yang menyebabkan genosida di tahun 1994 sampai dilakukannya pemilu yang kedua kalinya setelah genosida pada tahun

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam karya tulis ini penulis membagi kedalam Lima Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang memuat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan gambaran umum tentang Rwanda, mulai dari sejarah Rwanda, kondisi sosial dan politik termasuk kondisi pemerintahan yang terjadi sebelum ketegangan antar etnis (1962 – 1994).

Bab ketiga, mengemukakan kerusuhan antar etnis yang terjadi di Rwanda tahun 1994 dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Rwanda.

Bab keempat, mengemukakan faktor yang mempengaruhi proses transisi demokrasi di Rwanda. Antara lain, keberhasilan kelompok oposisi dalam menjalankan pemerintahan, mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil dan keberhasilan dalam *recovery economy*. Serta mode transisi demokrasi Rwanda.

Bab kelima, merupakan Bab akhir yang menutup karya tulis ini, yang berisi